



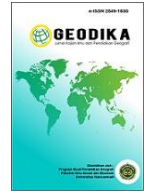
Website: <http://e-journal.hamzanwadi.ac.id/index.php/gdk>



GEODIKA
Jurnal Kajian Ilmu dan Pendidikan Geografi

Terakreditasi S5 – SK No. 177/E/KPT/2024

Penerbit: Universitas Hamzanwadi



Strategi Penanganan Permukiman Kumuh di Wilayah Kepulauan Menggunakan Pendekatan SWOT Berbobot: Studi Kasus Desa Sidanga

Muhammad Fiqri Ridwan^{1*}, Alwan², Safrudin Suaib Manyila³, Ansar A. Hamid⁴

¹Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Kabupaten Halmahera Tengah, Indonesia

²Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Sulawesi Tenggara, Kota Kendari, Indonesia

³Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Nahdlatul Ulama Maluku Utara, Kota Ternate, Indonesia

⁴Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Kabupaten Halmahera Tengah, Indonesia

*Email Koresponden: fqridwan@gmail.com

Diterima: 31-03-2026, Revisi: 13-08-2026, Disetujui: 26-08-2026

©2026 Universitas Hamzanwadi

Abstrak. Kawasan permukiman kumuh merupakan permasalahan perkotaan dan perdesaan yang memerlukan penanganan terencana berbasis data. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi kondisi kawasan permukiman kumuh di Desa Sidanga, Kecamatan Weda, Kabupaten Halmahera Tengah, menganalisis faktor penyebab kekumuhan melalui pendekatan SWOT berbobot (Matriks IFE/EFE), serta merumuskan strategi penanganan yang kontekstual. Metode yang digunakan adalah *mixed method*: penilaian skoring 16 sub-indikator dari 7 aspek kumuh sesuai Permen PUPR No. 14/2018, analisis SWOT dengan pembobotan IFE/EFE, dan analisis deskriptif-kualitatif. Mengingat jumlah populasi yang kecil (86 KK), seluruh KK dijadikan responden (metode sensus), ditambah 8 narasumber wawancara mendalam. Hasil penilaian menunjukkan total nilai kekumuhan sebesar 34 dengan rata-rata kekumuhan sektoral 40,53%, yang menempatkan Desa Sidanga dalam kategori kumuh Sedang (rentang 38–59). Aspek paling kritis adalah proteksi kebakaran (100% tidak layak, nilai 10) dan pengelolaan persampahan (nilai 10), diikuti ketidakterediaan drainase (84,95%). Skor IFE sebesar 2,38 mengindikasikan dominasi kelemahan internal yang masih dapat diatasi, sementara skor EFE 2,87 menunjukkan peluang eksternal melampaui ancaman. Analisis SWOT menghasilkan 12 strategi pada empat kuadran matriks. Strategi prioritas mencakup akselerasi program KOTAKU berbasis RP2KPKPK (SO), rehabilitasi darurat proteksi kebakaran dan persampahan (WO), dan pembangunan drainase adaptif (ST).

Kata kunci: Permukiman Kumuh, Desa Sidanga, Halmahera Tengah, Tingkat Kekumuhan, Analisis SWOT

Abstract. Slum areas are an urban and rural problem that requires data-driven, planned intervention. This study aims to identify the conditions of slum areas in Sidanga Village, Weda Subdistrict, Central Halmahera Regency; analyze the factors contributing to slum formation using a weighted SWOT analysis (IFE/EFE Matrix); and formulate context-specific intervention strategies. The method used was a mixed-method approach: scoring assessment of 16 sub-indicators across 7 slum aspects in accordance with Ministry of Public Works and Public Housing Regulation No. 14/2018, SWOT analysis with IFE/EFE weighting, and descriptive-qualitative analysis. Given the small population size (86 households), all households were included as respondents (census method), supplemented by 8 in-depth interview informants. The assessment results showed a total slum index score of 34 with an average sectoral slum index of 40.53%, placing Sidanga Village in the Moderate slum category (range 38–59). The most critical aspects were fire protection (100% inadequate, score of 10) and waste management (score of 10), followed by the lack of drainage (84.95%). An IFE score of 2.38 indicates a dominance of internal weaknesses that can still be addressed, while an EFE score of 2.87 indicates that external opportunities outweigh threats. The SWOT analysis yielded 12 strategies across the four quadrants of the matrix. Priority strategies include accelerating the KOTAKU program based on the RP2KPKPK (SO), emergency rehabilitation of fire protection and waste management (WO), and the construction of adaptive drainage systems (ST).

Keywords: Slum Settlements, Sidanga Village, Central Halmahera, Level of Slum Conditions, SWOT Analysis

PENDAHULUAN

Permukiman kumuh merupakan fenomena global yang terus menjadi perhatian dalam agenda pembangunan berkelanjutan, khususnya dalam kerangka *Sustainable Development Goals* (SDGs) tujuan ke-11 tentang kota dan permukiman yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan (Menezes et al., 2024). Secara global, urbanisasi yang tidak terkendali, ketimpangan ekonomi, serta keterbatasan akses terhadap layanan dasar menjadi faktor utama yang mendorong pertumbuhan kawasan kumuh, terutama di negara berkembang (Juta et al., 2024). Di Indonesia, dinamika ini tidak hanya terjadi di wilayah perkotaan besar, tetapi juga merambah wilayah perdesaan dan kepulauan yang memiliki karakteristik geografis dan sosial yang kompleks (Maharani et al., 2024). Fenomena ini menunjukkan bahwa persoalan permukiman kumuh bukan sekadar isu fisik spasial, tetapi juga mencerminkan ketidakmerataan pembangunan dan marginalisasi sosial yang berlangsung secara struktural (Lasaiba, 2022a; Pratiwi et al., 2024a).

Dalam konteks nasional, permukiman kumuh masih menjadi tantangan serius dalam pembangunan wilayah. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman mendefinisikan permukiman kumuh sebagai kawasan yang tidak layak huni akibat ketidakteraturan bangunan, kepadatan tinggi, serta kualitas prasarana dan sarana yang tidak memenuhi standar (Subekti et al., 2021; Syamsiar et al., 2021). Data Kementerian PUPR menunjukkan bahwa hingga tahun 2020, sekitar 20,53 juta kepala keluarga masih tinggal di kawasan kumuh di Indonesia (Diyanah & Bioresita, 2023). Temuan empiris dari berbagai laporan menunjukkan bahwa kondisi ini tidak hanya berdampak pada kualitas lingkungan, tetapi juga berimplikasi pada kesehatan masyarakat, tingkat pendidikan, serta produktivitas ekonomi warga (Lasaiba, 2022b; Zuhdi et al., 2024).

Kondisi tersebut juga tercermin pada kawasan permukiman kumuh di Desa Sidanga, Kecamatan Weda, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara. Desa Sidanga dipilih sebagai lokasi penelitian bukan hanya karena telah ditetapkan sebagai kawasan kumuh dalam Dokumen RP2KPKPK Tahun 2024, tetapi juga karena wilayah ini memiliki persoalan fisik, geografis, dan sosial yang cukup khas sebagai permukiman kepulauan. Kawasan kumuh di Desa Sidanga memiliki luas 5,14 hektar dan dihuni oleh 86 kepala keluarga yang masih menghadapi berbagai keterbatasan infrastruktur dasar. Penilaian terhadap 16 sub-indikator dalam tujuh aspek berdasarkan Permen PUPR No. 14 Tahun 2018 menghasilkan nilai kekumuhan 38 dengan rata-rata sektoral 40,53%, sehingga kawasan ini termasuk kategori kumuh sedang. Hasil observasi lapangan memperlihatkan beberapa persoalan utama, terutama keterbatasan akses air minum, belum memadainya jaringan drainase, pengelolaan persampahan, serta minimnya sarana proteksi kebakaran. Kondisi geografis sebagai wilayah kepulauan juga menjadi pertimbangan penting karena dapat memengaruhi proses penyediaan, pemeliharaan, dan pengembangan infrastruktur. Di sisi lain, hasil wawancara awal menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam program penataan kawasan masih terbatas. Atas dasar kondisi tersebut, Desa Sidanga dinilai relevan sebagai studi kasus untuk memahami hubungan antara tingkat kekumuhan, karakter geografis kepulauan, keterbatasan infrastruktur dasar, dan partisipasi masyarakat dalam perumusan strategi penanganan yang sesuai dengan kondisi setempat secara lebih utuh, terarah, realistis, tepat, dan dapat diterapkan berkelanjutan.

Dari perspektif sosial dan budaya, keberadaan permukiman kumuh tidak hanya berdampak pada kondisi fisik lingkungan, tetapi juga membentuk pola interaksi sosial, persepsi terhadap ruang, serta strategi bertahan hidup masyarakat. Pendekatan kualitatif menjadi penting untuk menggali makna pengalaman hidup masyarakat dalam menghadapi kondisi keterbatasan tersebut. Sejalan dengan teori konstruktivisme sosial, realitas permukiman kumuh tidak dapat dipahami hanya melalui indikator kuantitatif, tetapi juga melalui interpretasi subjektif masyarakat terhadap ruang dan lingkungannya (Prawesti et al., 2021; Syafrini et al., 2023). Oleh karena itu, penelitian ini menempatkan pengalaman, persepsi, dan praktik sosial masyarakat sebagai fokus utama dalam memahami dinamika kekumuhan di kawasan kepulauan.

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa penanganan permukiman kumuh tidak cukup dilakukan dari satu sisi saja. Pratiwi et al. (2024) menemukan bahwa sanitasi dan drainase menjadi faktor penting yang memengaruhi tingkat kekumuhan di Desa Sosok, Tayan. Sementara itu, Nur (2023) menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dapat meningkatkan efektivitas program penanganan kawasan kumuh di

Kota Makassar. Temuan lain juga memperlihatkan bahwa aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan perlu dipertimbangkan secara bersama dalam menyusun strategi penanganan kawasan kumuh (Mahayati et al., 2024; Pratiwi et al., 2024). Penelitian ini memiliki beberapa perbedaan dari studi sebelumnya. Dari sisi metode, penilaian tingkat kekumuhan dilakukan menggunakan 16 sub-indikator dalam tujuh aspek, kemudian dipadukan dengan analisis SWOT berbobot melalui Matriks IFE dan EFE agar faktor internal dan eksternal dapat dinilai secara lebih terarah. Dari sisi perumusan strategi, penelitian ini tidak hanya melihat kondisi fisik kawasan, tetapi juga menggunakan hasil wawancara, pandangan masyarakat, dan masukan pemangku kepentingan sebagai bahan pertimbangan. Selain itu, penelitian difokuskan pada kawasan permukiman kumuh di wilayah kepulauan yang memiliki persoalan geografis, aksesibilitas, ketersediaan infrastruktur dasar, dan kapasitas pelayanan yang berbeda dari kawasan perkotaan besar. Dengan demikian, kebaruan penelitian ini terletak pada penggabungan penilaian tingkat kekumuhan, analisis SWOT berbobot IFE/EFE, dan perspektif masyarakat untuk menghasilkan strategi yang lebih sesuai dengan karakteristik wilayah kepulauan, serta kebutuhan penanganan di lapangan.

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat kesenjangan penelitian yang signifikan dalam memahami dinamika permukiman kumuh di wilayah kepulauan, khususnya di Maluku Utara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi eksisting kawasan kumuh di Desa Sidanga berdasarkan indikator formal, mengidentifikasi faktor penyebab kekumuhan melalui pendekatan SWOT berbobot (IFE/EFE), serta merumuskan strategi penanganan yang kontekstual dan berbasis karakteristik wilayah kepulauan. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian perencanaan wilayah berbasis pendekatan kualitatif dengan menekankan dimensi pengalaman dan makna sosial. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi kebijakan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan strategi penanganan permukiman kumuh yang lebih adaptif, partisipatif, dan berkelanjutan di wilayah kepulauan Indonesia.

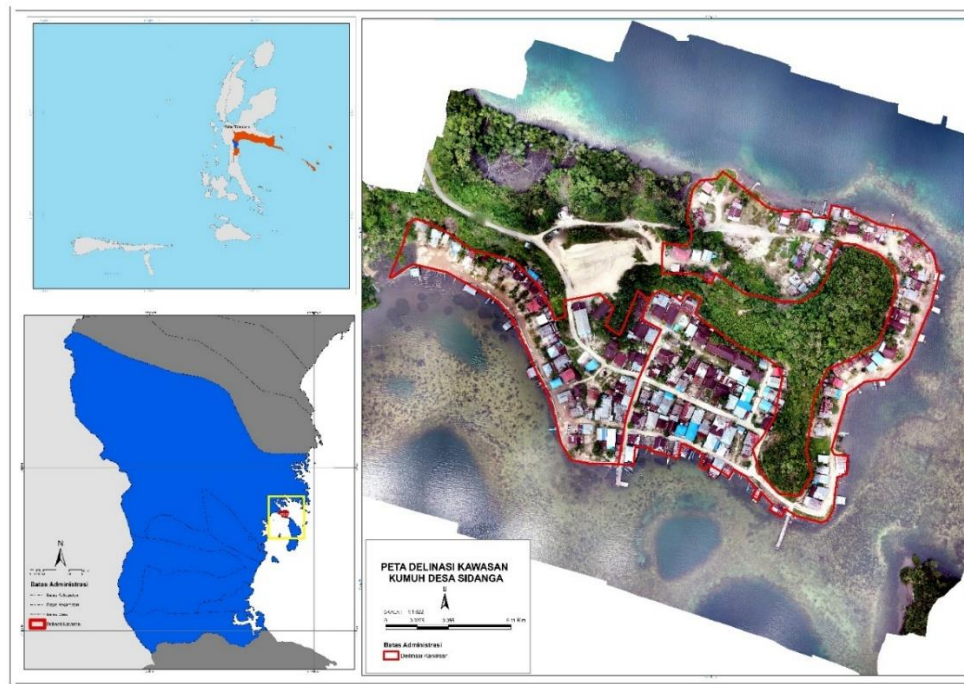
METODE PENELITIAN

Pendekatan dan Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *mixed method* yang mengintegrasikan data kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif digunakan untuk menilai tingkat kekumuhan berdasarkan 16 sub-indikator pada tujuh aspek sesuai Permen PUPR No. 14 Tahun 2018 serta menentukan bobot faktor internal dan eksternal melalui Matriks IFE dan EFE. Data kualitatif diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan delapan narasumber, observasi lapangan, dan telaah dokumen untuk mengidentifikasi faktor penyebab, kondisi lokal, serta persepsi pemangku kepentingan. Kedua data tersebut diintegrasikan melalui triangulasi untuk menyusun Matriks SWOT sebagai dasar perumusan strategi penanganan permukiman kumuh yang mempertimbangkan tingkat kekumuhan, karakteristik wilayah kepulauan, serta kondisi sosial dan kelembagaan Desa Sidanga. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik dengan orientasi pada penyusunan rekomendasi kebijakan berbasis kondisi empiris.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di kawasan permukiman kumuh Desa Sidanga, Kecamatan Weda, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1. Penetapan lokasi mengacu pada Dokumen RP2KPKPK Tahun 2024 yang menetapkan kawasan kumuh Desa Sidanga seluas 5,14 hektar dan digunakan sebagai baseline administratif serta spasial penelitian. Pengumpulan data lapangan dilaksanakan pada Januari–Maret 2026 dengan melakukan verifikasi terhadap kondisi eksisting melalui observasi, kuesioner, wawancara, dan dokumentasi lapangan. Penelitian ini tidak dirancang sebagai studi longitudinal yang secara khusus membandingkan perubahan seluruh indikator antara tahun 2024 dan 2026, sehingga tidak dilakukan pengukuran perubahan temporal secara kuantitatif untuk setiap indikator kekumuhan. Namun, kondisi tahun 2026 tidak diasumsikan identik dengan kondisi yang tercatat dalam RP2KPKPK 2024. Oleh karena itu, penilaian tingkat kekumuhan dalam penelitian ini didasarkan pada hasil verifikasi lapangan terkini, sedangkan Dokumen RP2KPKPK 2024 digunakan sebagai acuan awal untuk menentukan delineasi kawasan dan mengidentifikasi kondisi dasar yang selanjutnya dikonfirmasi dengan temuan empiris tahun 2026.



Gambar 1. Lokasi Penelitian
(Sumber: Rancangan Peneliti, 2026)

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi penelitian adalah seluruh kepala keluarga (KK) yang bermukim di kawasan kumuh Desa Sidanga seluas 5,14 hektar, berjumlah 86 KK berdasarkan data kependudukan Desa Sidanga (BPS Halmahera Tengah, 2024). Mengingat jumlah populasi yang tergolong kecil, penelitian ini menggunakan metode sensus, yaitu menjadikan seluruh 86 KK sebagai responden survei. Pendekatan sensus dipilih untuk menghasilkan data yang representatif dan meminimalkan kesalahan estimasi. Untuk komponen kualitatif, dipilih 8 narasumber wawancara mendalam secara purposive, terdiri dari: Kepala Desa (1 orang), Perangkat Desa (2 orang), tokoh masyarakat (2 orang), perwakilan Dinas PUPR Kabupaten (2 orang), dan fasilitator KOTAKU (1 orang).

Teknik Pengumpulan Data

Data primer diperoleh melalui: (1) survei lapangan dengan observasi dan dokumentasi fotografis menggunakan formulir penilaian kumuh terstandar; (2) kuesioner terstruktur yang diisi oleh 86 KK melalui enumerator terlatih; dan (3) wawancara mendalam dengan 8 narasumber menggunakan panduan wawancara semi-terstruktur. Data sekunder bersumber dari Dokumen RP2KPKPK, data kependudukan BPS Halmahera Tengah 2025, RTRW Kabupaten Halmahera Tengah, citra satelit, dan referensi regulasi terkait.

Instrumen Penilaian Kekumuhan

Penilaian tingkat kekumuhan mengacu pada 7 aspek dalam Permen PUPR No. 14 Tahun 2018, yang dijabarkan menjadi 16 sub-indikator terukur. Setiap sub-indikator dinilai berdasarkan persentase kondisi tidak layak: 0–25% = Rendah (nilai 0 atau 1), 26–50% = Sedang (nilai 3), 51–100% = Tinggi (nilai 5). Total nilai kekumuhan merupakan penjumlahan nilai seluruh sub-indikator. Klasifikasi akhir: Berat (60–80), Sedang (38–59), Ringan (16–37), Tidak Kumuh (<16).

Analisis SWOT dengan Pembobotan IFE/EFE

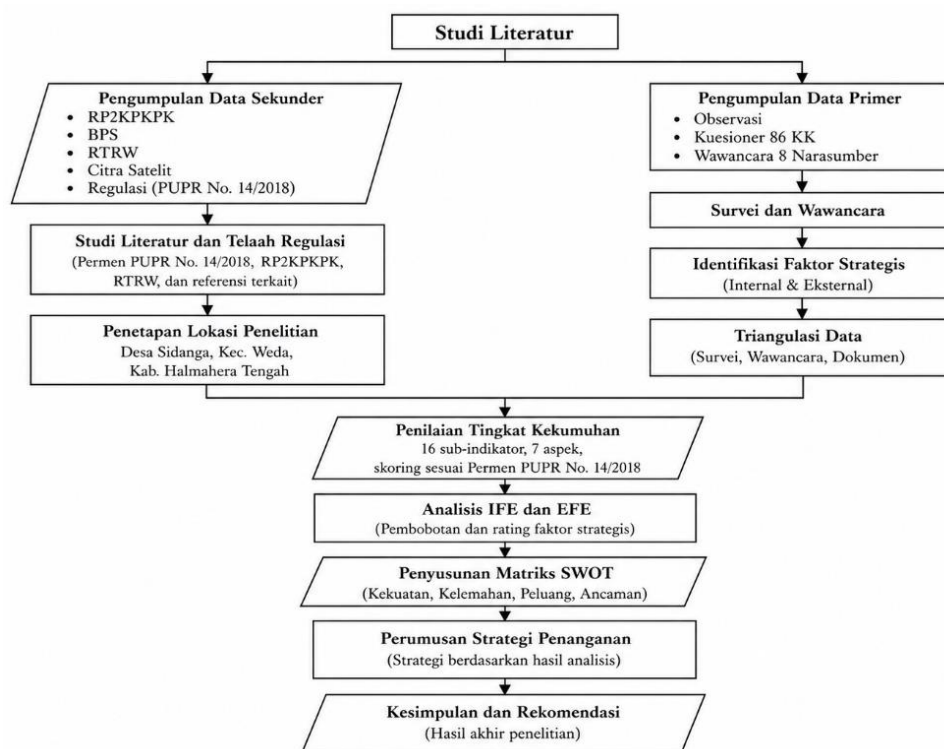
Identifikasi faktor SWOT dilakukan melalui triangulasi antara survei lapangan, wawancara mendalam, dan kajian dokumen kebijakan. Kuantifikasi faktor menggunakan Matriks IFE (faktor internal) dan EFE (faktor eksternal) (Mahanani et al., 2021). Setiap faktor diberi bobot (0,00–1,00) berdasarkan tingkat kepentingan terhadap kondisi kawasan, dan rating (1–4) berdasarkan efektivitas kondisi saat ini. Skor terbobot (bobot × rating) dijumlahkan untuk menghasilkan skor IFE dan EFE.

Skor di atas 2,50 mengindikasikan kekuatan/peluang mendominasi; skor di bawah 2,50 mengindikasikan kelemahan/ancaman mendominasi (Putri et al., 2023).

Uji Keabsahan Data Kualitatif

Keabsahan data dijaga melalui prosedur yang disesuaikan dengan karakteristik pendekatan *mixed method*. Pada komponen kuantitatif, kualitas data dikendalikan melalui instrumen penilaian kekumuhan yang mengacu pada 16 sub-indikator dalam tujuh aspek sesuai Permen PUPR No. 14 Tahun 2018, pemeriksaan kelengkapan dan konsistensi data, serta pengecekan kembali persentase dan skor sebelum analisis dilakukan. Pada komponen kualitatif, keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber dan metode, *member checking*, serta *peer debriefing*. Untuk meminimalkan subjektivitas dalam menentukan faktor SWOT, faktor internal dan eksternal ditetapkan hanya berdasarkan temuan yang telah dikonfirmasi melalui proses triangulasi, kemudian divalidasi oleh tiga ahli perencanaan wilayah melalui proses pembobotan dan *rating* IFE/EFE. Rangkaian prosedur tersebut digunakan untuk memastikan bahwa hasil penelitian memiliki konsistensi, dapat ditelusuri, dan memiliki tingkat kredibilitas yang baik.

Alur penelitian menggambarkan tahapan pelaksanaan studi secara sistematis, mulai dari pengumpulan data primer dan sekunder, penilaian tingkat kekumuhan, hingga analisis IFE, EFE, dan SWOT sebagai dasar perumusan strategi penanganan kawasan permukiman kumuh Desa Sidanga. Tahapan tersebut dirangkum dalam **Gambar 2**.



Gambar 2. Alur penelitian
(Sumber: Rancangan Peneliti, 2026)

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penilaian Tingkat Kekumuhan

Berdasarkan hasil survei lapangan terhadap seluruh 86 KK, tingkat kekumuhan Desa Sidanga dinilai menggunakan 16 sub-indikator yang tercakup dalam tujuh aspek penilaian sesuai Permen PUPR No. 14 Tahun 2018. Untuk menjaga konsistensi interpretasi, seluruh sub-indikator dinyatakan sebagai kondisi negatif atau tingkat ketidaksesuaian terhadap standar pelayanan. Dengan demikian, semakin besar persentase ketidaksesuaian, semakin tinggi tingkat permasalahan pada sub-indikator tersebut. Penilaian dilakukan berdasarkan proporsi kondisi yang tidak memenuhi persyaratan, yaitu 0–25% dikategorikan rendah dengan skor 0 atau 1, 26–50% dikategorikan sedang dengan skor 3, dan 51–100% dikategorikan tinggi dengan skor 5. Skor setiap sub-indikator selanjutnya dijumlahkan untuk

menentukan tingkat kekumuhan kawasan, dengan klasifikasi total skor <16 sebagai tidak kumuh, 16–37 sebagai kumuh ringan, 38–59 sebagai kumuh sedang, dan 60–80 sebagai kumuh berat. Hasil penilaian menunjukkan bahwa Desa Sidanga memperoleh total nilai kekumuhan sebesar 38 dengan rata-rata kekumuhan sektoral 40,53%, sehingga termasuk dalam kategori kumuh sedang. Rincian hasil penilaian disajikan pada **Tabel 1**.

Tabel 1. Kondisi Kawasan Kumuh Desa Sidanga Tahun 2025

ASPEK	KRITERIA	VOLUME	SATUAN	PERSENTASE (%)	NILAI
Kondisi bangunan gedung	a. Ketidakteraturan Bangunan	21,00	Unit	29,17%	1
	b. Kepadatan Bangunan yang Tidak Sesuai Ketentuan	-	Ha	0,00%	0
	c. Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan	28,00	Unit	38,89%	1
	Rata-rata Kondisi Bangunan Gedung			22,69%	
Kondisi jalan lingkungan	a. Ketidcakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	169,98	Meter	15,07%	0
	b. Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan yang Tidak Memadai	775,60	Meter	68,75%	3
	Rata-rata Kondisi Jalan Lingkungan			34,38%	
Kondisi Penyediaan Air Minum	a. Ketidakterediaan Akses Aman Air Minum	41,00	KK	47,67%	1
	b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	45,00	KK	52,33%	3
	Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Minum			50,00%	
Kondisi Drainase Lingkungan	a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	0,31	Ha	6,03%	0
	b. Ketidakterediaan Drainase	960,60	Meter	84,95%	5
	c. Kualitas Konstruksi Drainase yang Tidak Memadai	-	Meter	0,00%	0
	Rata-rata Kondisi Drainase Lingkungan			16,99%	
Kondisi pengelolaan air limbah	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	7,00	KK	8,14%	0
	b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	17,00	KK	19,77%	0
	Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Limbah			0,00%	
Kondisi Pengelolaan Persampahan	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	86,00	KK	100,00%	5
	b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	68,00	KK	79,07%	5
	Rata-rata Kondisi Pengelolaan Persampahan			59,69%	
Kondisi Proteksi Kebakaran	a. Ketidakterediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	72,00	Unit	100,00%	5
	b. Ketidakterediaan Sarana Proteksi Kebakaran	72,00	Unit	100,00%	5
	Rata-rata Kondisi Proteksi Kebakaran			100,00%	
Batas Ambang Nilai Tingkat Kekumuhan					
60 – 80 : Kumuh Berat				—	
38 – 59 : Kumuh Sedang		Total Nilai	38		
16 – 37 : Kumuh Ringan		Tingkat Kekumuhan	Kumuh Sedang		
< 16 : Dinyatakan Tidak Kumuh		Rata-Rata Kekumuhan Sektoral	40,53%		

Sumber: Hasil Survei Lapangan dan Penilaian Instrumen Permen PUPR No. 14/2018, 2025

Berdasarkan hasil analisis yang disajikan pada **Tabel 1**, tingkat kekumuhan kawasan memperlihatkan permasalahan yang bervariasi pada setiap aspek penilaian. Pada aspek bangunan gedung, ketidakteraturan bangunan mencapai 29,17% dan ketidaksesuaian terhadap persyaratan teknis sebesar 38,89%, dengan rata-rata permasalahan 22,69% yang berada pada kategori ringan hingga sedang. Pada aspek infrastruktur dasar, cakupan pelayanan jalan masih tergolong rendah, yaitu 15,07%, meskipun 68,75% kondisi permukaan jalan berada dalam kondisi baik; sementara itu, akses terhadap air minum masih terbatas karena 52,33% masyarakat belum mendapatkan layanan yang layak. Permasalahan drainase terutama berkaitan dengan belum tersedianya jaringan drainase yang mencapai 84,95%, sedangkan kondisi pengelolaan air limbah relatif sudah baik. Aspek persampahan menjadi salah satu persoalan yang cukup dominan karena seluruh prasarana persampahan atau 100% belum memenuhi standar, sementara 79,07% sistem pengelolaannya masih belum sesuai dengan ketentuan. Permasalahan yang paling serius ditemukan pada aspek proteksi kebakaran, dengan tingkat ketidaktersediaan sarana dan prasarana yang mencapai 100%. Secara keseluruhan, nilai kekumuhan sebesar 38 dengan rata-rata sektoral 40,53% menunjukkan bahwa kawasan tersebut termasuk dalam kategori kumuh sedang, sehingga upaya penanganan perlu difokuskan pada persampahan, proteksi kebakaran, penyediaan air minum, drainase, dan infrastruktur dasar melalui pendekatan yang terpadu dan berkelanjutan.

Analisis Faktor Penyebab Kekumuhan

Berdasarkan triangulasi data survei lapangan, wawancara mendalam dengan 8 narasumber, dan kajian dokumen, terdapat lima faktor utama penyebab kekumuhan di Desa Sidanga. Pertama, absennya infrastruktur proteksi kebakaran dan pengelolaan persampahan yang merupakan akibat langsung dari keterbatasan investasi infrastruktur di kawasan kepulauan terpencil. Kedua, keterbatasan jaringan drainase yang mencakup hampir 85% kawasan mencerminkan pertumbuhan permukiman yang lebih cepat dari pembangunan prasarana penunjangnya. Ketiga, defisit air minum yang memengaruhi lebih dari separuh KK merupakan kombinasi dari keterbatasan geografis dan kapasitas fiskal daerah. Keempat, kerentanan geografis kawasan kepulauan terhadap bencana hidrometeorologi yang mempersulit perawatan infrastruktur. Kelima, pertumbuhan permukiman organik tanpa perencanaan yang memadai menghasilkan ketidakteraturan bangunan yang sulit ditertibkan secara retroaktif.

Analisis SWOT dengan Pembobotan IFE/EFE

Identifikasi faktor strategis dalam penelitian ini dilakukan melalui triangulasi hasil survei lapangan, wawancara mendalam, dan kajian dokumen. Untuk menjaga keseimbangan analisis serta menghindari dominasi jumlah faktor tertentu dalam proses pembobotan, faktor SWOT disusun secara proporsional dengan masing-masing lima faktor pada kategori *strengths*, *weaknesses*, *opportunities*, dan *threats*. Pemilihan lima faktor pada setiap kategori didasarkan pada tingkat relevansi, urgensi permasalahan, konsistensi kemunculan dalam hasil triangulasi, serta pengaruhnya terhadap penanganan kawasan permukiman kumuh Desa Sidanga. Faktor-faktor yang memiliki tingkat kepentingan lebih rendah atau memiliki substansi yang beririsan dengan faktor lain dieliminasi atau diintegrasikan ke dalam faktor yang lebih representatif. Selanjutnya, setiap faktor diberi bobot berdasarkan tingkat kepentingannya dan rating berdasarkan kondisi atau respons eksisting, kemudian dihitung skor terbobot sebagai dasar penyusunan Matriks IFE dan EFE.

Matriks IFE disusun berdasarkan 5 faktor kekuatan dan 6 faktor kelemahan yang diidentifikasi melalui triangulasi termuat dalam **Tabel 2**. Bobot dan rating ditentukan berdasarkan konsultasi dengan 3 ahli perencanaan wilayah dan dikonfirmasi melalui *member checking*.

Tabel 2. Matriks IFE Kawasan Permukiman Kumuh Desa Sidanga

Faktor Internal	Bobot	Rating (1-4)	Skor Terbobot
KEKUATAN (<i>Strengths</i>)			
S1. Dokumen RP2KPKPK tersedia sebagai landasan legal dan teknis	0,153	4	0,612
S2. Pengelolaan air limbah relatif terkendali, dengan tingkat permasalahan <25%	0,102	3	0,306
S3. Kondisi limpasan drainase relatif terkendali, dengan tingkat permasalahan 6,03%	0,082	3	0,246
S4. Status kawasan memungkinkan penanganan secara terfokus tanpa relokasi massal	0,092	3	0,276
S5. Modal sosial masyarakat berupa budaya gotong royong yang kuat	0,081	3	0,243
KELEMAHAN (<i>Weaknesses</i>)			
W1. Tidak tersedia prasarana dan sarana proteksi kebakaran pada 100% unit	0,143	1	0,143
W2. Pengelolaan persampahan kritis, dengan 100% prasarana dan 79,07% sistem tidak memenuhi standar	0,133	1	0,133
W3. Ketidaktersediaan jaringan drainase mencapai 84,95%	0,092	2	0,184
W4. Kebutuhan air minum belum terpenuhi pada 52,33% KK	0,081	2	0,162
W5. Kualitas jalan lingkungan belum memadai pada 68,75% ruas yang dinilai	0,041	2	0,082
TOTAL	1,000		2,387

Sumber: Hasil Analisis, 2025.

Keterangan: Rating 4=sangat kuat, 3=kuat, 2=lemah, 1=sangat lemah

Berdasarkan hasil analisis Matriks IFE pada **Tabel 2**, kawasan permukiman kumuh Desa Sidanga memperoleh skor terbobot sebesar 2,387, yang mengindikasikan bahwa kondisi internal kawasan masih lebih banyak dipengaruhi oleh kelemahan, meskipun terdapat sejumlah kekuatan yang dapat dikembangkan. Kekuatan utama kawasan ditunjukkan oleh ketersediaan Dokumen RP2KPKPK sebagai dasar perencanaan (0,612), pengelolaan air limbah yang relatif baik, kondisi limpasan drainase yang masih dapat dikendalikan, peluang penanganan kawasan tanpa relokasi massal, serta modal sosial masyarakat yang tercermin melalui kegiatan gotong royong. Di sisi lain, kelemahan utama mencakup belum tersedianya sistem proteksi kebakaran, pengelolaan persampahan yang belum memenuhi standar, keterbatasan jaringan drainase yang mencapai 84,95%, kebutuhan air minum yang belum terpenuhi pada 52,33% KK, serta kualitas jalan lingkungan yang masih rendah. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya penanganan perlu diarahkan pada pemenuhan infrastruktur dasar dan peningkatan kualitas layanan lingkungan, dengan memanfaatkan dokumen perencanaan yang tersedia serta partisipasi masyarakat sebagai modal utama untuk mendukung pelaksanaan program yang efektif dan berkelanjutan.

Tabel 3. Matriks EFE Kawasan Permukiman Kumuh Desa Sidanga

Faktor Eksternal	Bobot	Rating (1-4)	Skor Terbobot
PELUANG (<i>Opportunities</i>)			
O1. Program KOTAKU dapat dimanfaatkan dengan dukungan Dokumen RP2KPKPK	0,158	4	0,632
O2. Program BSPS Kementerian PUPR mendukung rehabilitasi rumah tidak layak huni	0,126	4	0,504
O3. Dana Desa dapat diarahkan untuk mendukung penanganan komponen kekumuhan prioritas	0,105	3	0,315
O4. Dukungan kebijakan pembangunan nasional terhadap peningkatan kualitas permukiman	0,095	3	0,285
O5. Tersedianya alternatif teknologi tepat guna untuk wilayah kepulauan, seperti sumur bor komunal dan TPS 3R	0,074	3	0,222
ANCAMAN (<i>Threats</i>)			
T1. Pertumbuhan permukiman kumuh akibat penambahan penduduk yang tidak terkendali	0,126	2	0,252
T2. Keterbatasan fiskal daerah dapat menghambat implementasi program	0,105	2	0,210
T3. Kerentanan terhadap bencana hidrometeorologi, seperti banjir, abrasi, dan angin kencang	0,084	2	0,168
T4. Isolasi geografis menyebabkan biaya logistik tinggi dan keterbatasan akses tenaga ahli	0,074	3	0,222
T5. Keterbatasan sumber daya manusia teknis lokal dan fasilitator terlatih	0,053	2	0,106
TOTAL	1,000		2,916

Sumber: Hasil Analisis, 2025.

Keterangan: Rating 4=respons sangat baik, 3=baik, 2=rata-rata, 1=buruk

Berdasarkan hasil analisis Matriks EFE pada **Tabel 3**, kawasan permukiman kumuh Desa Sidanga memperoleh skor terbobot sebesar 2,916. Nilai tersebut menunjukkan bahwa kondisi eksternal kawasan tergolong cukup mendukung, dengan peluang yang lebih besar dibandingkan ancaman yang dihadapi. Peluang utama berasal dari Program KOTAKU dan dokumen RP2KPKPK dengan skor 0,632, Program BSPS Kementerian PUPR sebesar 0,504, serta Dana Desa sebesar 0,315. Peluang tersebut juga diperkuat oleh kebijakan pembangunan nasional dan penerapan teknologi tepat guna yang sesuai dengan karakteristik wilayah kepulauan. Meskipun demikian, beberapa ancaman masih perlu mendapat perhatian, antara lain pertumbuhan permukiman akibat peningkatan jumlah penduduk, keterbatasan fiskal daerah, risiko bencana hidrometeorologi, isolasi geografis, tingginya biaya logistik, serta keterbatasan tenaga teknis dan fasilitator. Dengan demikian, strategi penanganan perlu diarahkan pada optimalisasi program, sumber pembiayaan, kebijakan, dan teknologi yang tersedia, sekaligus memperkuat kapasitas masyarakat dan kelembagaan lokal.

Hasil analisis IFE dan EFE menunjukkan bahwa kondisi internal kawasan berada pada kategori sedang dengan skor IFE sebesar 2,387, sedangkan kondisi eksternalnya tergolong cukup mendukung dengan skor EFE sebesar 2,916. Kekuatan internal kawasan terlihat dari adanya dukungan RP2KPKPK, pengelolaan air limbah yang relatif baik, serta modal sosial masyarakat yang dapat mendukung pelaksanaan program penanganan permukiman kumuh. Namun, kawasan masih memiliki beberapa kelemahan, terutama dalam aspek proteksi kebakaran, pengelolaan persampahan, sistem drainase, pelayanan air minum, dan kualitas jaringan jalan. Dari sisi eksternal, peluang yang tersedia melalui program pemerintah, sumber pembiayaan, dukungan kebijakan, dan pemanfaatan teknologi cukup besar. Pada saat yang sama, kawasan masih menghadapi berbagai kendala berupa keterbatasan fiskal, pertumbuhan permukiman, risiko bencana, isolasi geografis, serta keterbatasan sumber daya manusia teknis. Dengan demikian, strategi penanganan perlu memanfaatkan peluang eksternal secara optimal untuk memperkuat kapasitas internal kawasan dan secara bertahap mengatasi kelemahan yang masih menjadi kendala utama.

Matriks Strategi SWOT

Operasionalisasi analisis SWOT ke dalam empat kuadran menghasilkan 12 rekomendasi strategis yang saling melengkapi. Strategi SO (Agresif) memanfaatkan ketersediaan RP2KPKPK untuk mengakses program KOTAKU dan BSPS. Strategi WO (Progresif) menggunakan peluang pembiayaan nasional untuk mengatasi kelemahan kritis khususnya proteksi kebakaran dan persampahan. Strategi ST (Defensif Kuat) memanfaatkan kekuatan internal untuk menghadapi ancaman bencana dan pertumbuhan kumuh. Strategi WT (Bertahan) memperkuat tata kelola dan regulasi bangunan sebagai pertahanan jangka menengah.

Strategi Penanganan Per Aspek Kekumuhan

Perumusan strategi penanganan kawasan permukiman kumuh di Desa Sidanga dilakukan melalui beberapa tahapan, dimulai dari identifikasi permasalahan prioritas berdasarkan tujuh aspek kekumuhan. Tahap berikutnya mencakup analisis faktor internal, yaitu kekuatan dan kelemahan, serta faktor eksternal, yaitu peluang dan ancaman, yang diperoleh melalui survei, wawancara, dan kajian dokumen, kemudian dilakukan pengukuran menggunakan Matriks IFE dan EFE untuk mengetahui posisi strategis kawasan. Selanjutnya, faktor internal dan eksternal dipadukan dalam Matriks SWOT melalui strategi SO, WO, ST, dan WT, yang diarahkan untuk memanfaatkan kekuatan dan peluang, mengatasi kelemahan dengan memanfaatkan peluang, menggunakan kekuatan dalam menghadapi ancaman, serta mengurangi kelemahan sekaligus menghindari ancaman. Hasil strategi tersebut kemudian dijabarkan ke dalam berbagai tindakan penanganan untuk setiap aspek dengan memperhatikan tingkat urgensi, kelayakan teknis, karakteristik wilayah kepulauan, dukungan kelembagaan, dan ketersediaan sumber pembiayaan, sebagaimana ditampilkan pada **Tabel 4**.

Tabel 4. Matriks Strategi Penanganan Per Aspek Kawasan Kumuh Desa Sidanga

Aspek	Permasalahan Utama	Dasar Strategi SWOT	Strategi Penanganan
Bangunan Gedung	Ketidaksesuaian persyaratan teknis dan ketidakteraturan bangunan	WO	Sosialisasi PBG/SLF, program BSPS, pendampingan teknis
Jalan Lingkungan	Kualitas permukaan belum memadai	WO/ST	Rehabilitasi ruas kritis, drainase tepi jalan, pemeliharaan
Air Minum	52,33% KK belum terpenuhi kebutuhan air minum	WO	Sumur bor komunal, perluasan jaringan, tandon bersama
Drainase	Ketidakterediaan drainase 84,95%	ST/WO	Pembangunan saluran baru, normalisasi, pemeliharaan
Air Limbah	Prasarana belum sepenuhnya memenuhi standar	SO/ST	Edukasi sanitasi, septic tank sesuai SNI, STBM
Persampahan	Prasarana dan sistem pengelolaan belum sesuai standar	WO	TPS 3R, bank sampah, pengangkutan terjadwal
Proteksi Kebakaran	100% belum memiliki prasarana dan sarana	WO/ST	Hidran lingkungan, APAR, relawan siaga kebakaran

Sumber: Hasil analisis data penelitian, 2026

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan permukiman, strategi penanganan dirumuskan dengan mempertimbangkan tingkat urgensi dan karakteristik dari setiap aspek. Pada aspek bangunan gedung, permasalahan ketidaksesuaian persyaratan teknis (38,89%) dan ketidakteraturan bangunan (29,17%) ditangani melalui sosialisasi PBG dan SLF, perbaikan struktur bangunan melalui BSPS, pendampingan teknis, serta peningkatan pengawasan terhadap pembangunan. Pada infrastruktur dasar, kondisi jalan yang buruk (68,75%) dan keterbatasan akses air minum (52,33% KK) memerlukan rehabilitasi jalan, peningkatan sistem drainase, pemeliharaan secara rutin, pembangunan sumur bor komunal, perluasan jaringan PDAM, penyediaan tandon air bersama, serta edukasi mengenai PHBS. Pada aspek drainase dan air limbah, tingginya ketidakterediaan drainase (84,95%) perlu ditangani melalui pembangunan saluran baru, normalisasi saluran, dan pemeliharaan secara berkala, sedangkan pengelolaan air limbah perlu diperkuat melalui edukasi sanitasi, pembangunan septic tank sesuai SNI, serta pelaksanaan program STBM. Pada aspek persampahan dan proteksi kebakaran, kondisi prasarana persampahan yang tidak layak (100%) dan sistem pengelolaan yang belum sesuai standar (79,07%) ditangani melalui penyediaan TPS 3R, pengembangan bank sampah, pengangkutan secara terjadwal, serta pemilahan sampah sejak dari sumber, sementara belum tersedianya sistem proteksi kebakaran (100%) memerlukan penyediaan hidran, APAR, serta pembentukan dan pelatihan relawan siaga kebakaran pada tingkat RT/RW. Strategi tersebut diarahkan untuk meningkatkan kualitas, keamanan, dan ketahanan kawasan permukiman secara berkelanjutan.

Penelitian ini menunjukkan bahwa permukiman kumuh di Desa Sidanga termasuk dalam kategori kumuh sedang, dengan nilai kekumuhan sebesar 38 dan rata-rata sektoral mencapai 40,53%. Permasalahan yang paling menonjol berkaitan dengan persampahan, proteksi kebakaran, drainase, serta keterbatasan infrastruktur dasar. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat kekumuhan tidak hanya berkaitan dengan kondisi fisik lingkungan, tetapi juga dipengaruhi oleh keterbatasan akses terhadap layanan dan kapasitas masyarakat dalam mengelola lingkungan. Hasil analisis SWOT berbobot menunjukkan bahwa penanganan kawasan perlu dilakukan melalui kombinasi intervensi fisik, sosial, dan kelembagaan yang disesuaikan dengan kondisi lokal. Strategi yang dirumuskan juga menunjukkan bahwa aspek teknis dan sosial perlu ditempatkan secara seimbang dalam proses perencanaan wilayah. Penanganan kawasan kumuh tidak cukup hanya dengan membangun atau memperbaiki infrastruktur, tetapi juga membutuhkan keterlibatan masyarakat serta penguatan kapasitas lokal. Kegiatan seperti gotong royong, edukasi sanitasi, dan pengelolaan lingkungan berbasis masyarakat menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan program. Dengan demikian, keberhasilan penanganan kawasan kumuh sangat bergantung pada keseimbangan antara intervensi teknis dan pendekatan sosial yang mampu menyesuaikan dengan kondisi masyarakat setempat.

Jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini memiliki keunikan karena menggabungkan penilaian indikator kekumuhan dengan analisis SWOT berbobot melalui matriks IFE dan EFE. Pratiwi et al. (2024) menekankan pentingnya perbaikan sanitasi dan drainase dalam

penanganan kawasan kumuh, sedangkan Nur (2023) menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif memiliki peran penting dalam proses penanganannya. Penelitian ini mengembangkan temuan tersebut dengan menghasilkan prioritas strategi yang lebih terukur serta mempertimbangkan karakteristik wilayah kepulauan, termasuk keterbatasan akses, tingginya biaya logistik, dan terbatasnya tenaga teknis. Temuan penelitian dapat dianalisis melalui tiga dimensi utama, yaitu spasial, sosial, dan kebijakan. Dari aspek spasial, ketidakmerataan penyediaan infrastruktur menjadi salah satu faktor yang berkontribusi terhadap terbentuknya kawasan kumuh. Dari aspek sosial, keterbatasan layanan dasar berpengaruh terhadap kualitas hidup sekaligus membentuk pola adaptasi masyarakat terhadap kondisi lingkungan. Sementara itu, dari aspek kebijakan, RP2KPKPK serta program KOTAKU dan BSPS dapat menjadi instrumen pendukung dalam upaya penanganan kawasan kumuh. Oleh karena itu, penanganan kawasan perlu dilakukan secara terpadu dengan menghubungkan perencanaan ruang, pemberdayaan masyarakat, dan kebijakan pembangunan.

Implikasi penelitian menunjukkan bahwa strategi yang dihasilkan berpotensi meningkatkan kualitas lingkungan, memperluas akses terhadap infrastruktur, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah. Namun, pelaksanaannya tetap berpotensi menghadapi resistensi masyarakat terhadap perubahan, khususnya ketika penerapan standar teknis dan pengelolaan lingkungan memerlukan penyesuaian terhadap kebiasaan yang telah berlangsung. Oleh sebab itu, proses implementasi perlu dilakukan secara inklusif melalui edukasi, pendampingan, dan penguatan kelembagaan di tingkat lokal. Pendekatan tersebut diharapkan tidak hanya mampu mengatasi permasalahan fisik kawasan, tetapi juga mendorong terbentuknya lingkungan permukiman yang lebih layak huni dan berkelanjutan.

SIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kawasan permukiman kumuh Desa Sidanga berada pada kategori kumuh sedang, dengan masalah utama pada proteksi kebakaran, pengelolaan persampahan, jaringan drainase, pemenuhan kebutuhan air minum, dan kualitas jalan lingkungan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kekumuhan tidak hanya disebabkan oleh kondisi fisik permukiman, tetapi juga oleh keterbatasan pelayanan infrastruktur dasar dan pengelolaan kawasan. Analisis faktor internal menghasilkan skor IFE sebesar 2,387 yang menunjukkan kondisi internal pada tingkat sedang, karena kekuatan berupa ketersediaan Dokumen RP2KPKPK, pengelolaan air limbah yang relatif terkendali, dan modal sosial masyarakat belum mampu sepenuhnya mengatasi berbagai kelemahan infrastruktur. Sementara itu, analisis faktor eksternal memperoleh skor EFE sebesar 2,916 yang menunjukkan kondisi cukup mendukung melalui peluang berupa program pemerintah, sumber pembiayaan, dukungan kebijakan, dan penerapan teknologi tepat guna, meskipun masih terdapat ancaman berupa keterbatasan fiskal, risiko bencana, isolasi geografis, dan keterbatasan tenaga teknis. Berdasarkan hasil penilaian kekumuhan dan analisis SWOT, strategi penanganan diarahkan untuk memanfaatkan dukungan eksternal dalam mengatasi kelemahan internal melalui peningkatan proteksi kebakaran, pengelolaan persampahan, pembangunan dan rehabilitasi drainase, penyediaan layanan air minum, peningkatan kualitas jalan lingkungan, serta penguatan partisipasi masyarakat. Dengan demikian, penanganan kawasan permukiman kumuh Desa Sidanga perlu dilakukan secara terpadu dan berbasis prioritas masalah dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah kepulauan agar peningkatan kualitas permukiman dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Diyanah, I., & Bioresita, F. (2023). Analisa Kawasan Permukiman Kumuh di Kecamatan Kenjeran Surabaya Menggunakan Metode NDBI dan OBIA serta Data Citra Sentinel-2 Tahun 2022. *Geoid*, 19(1), 180. <https://doi.org/10.12962/j24423998.v19i1.18092>
- Juta, L. B., Taleat, B. A., & Hassan, A. O. (2024). Reimagine the Progress of Implementation Strategies of Sustainable Development Goal 11 in Nigerian State. *International Journal of Sustainable Development and Planning*, 19(11), 4251–4261. <https://doi.org/10.18280/ijstdp.191114>

- Lasaiba, M. A. (2022a). Perkotaan dalam Perspektif Kemiskinan, Permukiman Kumuh dan Urban Heat Island (Suatu Telaah Literatur). *GEOFORUM*, 1(2), 63–72. <https://doi.org/10.30598/geoforumvol1iss2pp63-72>
- Lasaiba, M. A. (2022b). Perkotaan dalam Perspektif Kemiskinan, Permukiman Kumuh dan Urban Heat Island (Suatu Telaah Literatur). *GEOFORUM*, 1(2), 63–72. <https://doi.org/10.30598/geoforumvol1iss2pp63-72>
- Mahanani, R. S., Hidayat, T., Wardati, I., Galushasti, A., & Wiyono, L. C. (2021). Local economic development strategies to increase economic growth in agrotourism areas. *Turyzm/Tourism*, 31(2), 117–131. <https://doi.org/10.18778/0867-5856.31.2.07>
- Maharani, A. R., Wargadalem, F. R., & Safitri, S. (2024). Urbanisasi dalam Tinjauan Historis: Studi Kasus Permukiman Kumuh di Kelurahan 3-4 Ulu Kota Palembang, 2010-2020. *Fajar Historia: Jurnal Ilmu Sejarah dan Pendidikan*, 8(1), 30–51. <https://doi.org/10.29408/fhs.v8i1.22524>
- Mahayati, P., Astuti, W., & Yudana, G. (2024). Faktor prioritas kesiapan penanganan kawasan permukiman kumuh (studi kasus: bantaran Sungai Kali Anyar, Kota Surakarta). *Region: Jurnal Pembangunan Wilayah dan Perencanaan Partisipatif*, 19(1), 127. <https://doi.org/10.20961/region.v19i1.64560>
- Menezes, A. D. S., Ribeiro Mello, A. J., Pereira Rodrigues, A. R., & Henriques Motta, W. (2024). Housing liabilities and inadequate housing conditions in Brazilian Municipalities: Subnormal Agglomerates and the Challenges of the 2030 Agenda. *Revista Geográfica de América Central*, (72), 79-105.
- Nur, K. W. (2023). Aplikasi Urban Akupunktur Sebagai Upaya Mitigasi Bencana pada Permukiman Kumuh di Kota Makassar. *Jurnal Arsitektur dan Perencanaan (JUARA)*, 6(1), 12–22. <https://doi.org/10.31101/juara.v6i1.2757>
- Pratiwi, N. N., Lubis, M. S., Nurhidayati, E., Wulandari, A., & Elysia, V. (2024a). Identifikasi strategi peningkatan kualitas permukiman kumuh berdasarkan indikator pencetusnya (Studi kasus: Desa Sosok, Tayan). *Region: Jurnal Pembangunan Wilayah dan Perencanaan Partisipatif*, 19(2), 495. <https://doi.org/10.20961/region.v19i2.77162>
- Pratiwi, N. N., Lubis, M. S., Nurhidayati, E., Wulandari, A., & Elysia, V. (2024b). Identifikasi strategi peningkatan kualitas permukiman kumuh berdasarkan indikator pencetusnya (Studi kasus: Desa Sosok, Tayan). *Region: Jurnal Pembangunan Wilayah dan Perencanaan Partisipatif*, 19(2), 495. <https://doi.org/10.20961/region.v19i2.77162>
- Prawesti, S. A., Purnomo, D., & Hadiwijoyo, S. S. (2021). Analisis pemanfaatan ruang terbuka non hijau sebagai representasi ruang sosial di kawasan kumuh (studi wilayah pancuran kota salatiga). *Jurnal Analisa Sosiologi*, 10. <https://doi.org/10.20961/jas.v10i0.47638>
- Putri, M. A., Rahayu, A., & Dirgantari, P. D. (2023). Analisis strategi pemasaran menggunakan matriks SWOT, matriks IFE, matriks EFE, dan matriks IE (Studi kasus pada bisnis Banjagim.id). *Jurnal Manajemen Bisnis dan Kewirausahaan*, 7(1), 224–234. <https://doi.org/10.24912/jmbk.v7i1.20703>
- Subekti, S., Prayoga, I., & Sudrajat, A. S. E. (2021). Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah Sebagai Upaya Penanganan Kawasan Kumuh Di Kawasan Pecangaan Kabupaten Jepara. *Indonesian Journal of Spatial Planning*, 1(2), 45–50. <https://doi.org/10.26623/ijsp.v1i2.3105>
- Syafrini, D., Nurlizawati, N., Wirdanengsih, W., & Permata, B. D. (2023). Pembangunan Pariwisata di Sekitar Slum Area Perkotaan: Dari Marginalisasi Menuju Transformasi. *Jurnal Kawistara*, 13(1), 1. <https://doi.org/10.22146/kawistara.78942>
- Syamsiar, N. R., Surya, B., & Tato, S. (2021). Evaluasi Penanganan Permukiman Kumuh. *Urban and Regional Studies Journal*, 2(2), 54–65. <https://doi.org/10.35965/ursj.v2i2.324>
- Zuhdi, S., Rusli, B., Buchari, R. A., Sugandi, Y. S., & Suryana, D. (2024). Policy Network in the Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Program in Pekan Baru City, Riau Province, Indonesia. *International Journal of Sustainable Development and Planning*, 19(8), 3175–3187. <https://doi.org/10.18280/ijstdp.190830>